P-ISSN 0126-043X
E-ISSN 27162-400

WASATHIYAH SEBAGAI PARADIGMA MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA: GENEALOGI, OPERASIONALISASI, DAN TANTANGAN BAGI PERDAMAIAN GLOBAL

Utomo[1], Ahmad Shofiyuddin[2]
[1]Program Studi Doktor PAI, Universitas Wahid Hasyim
*Email: 25300031035@student.unwahas.ac.id
[2]Program Studi PAI, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: shof@unugiri.ac.id

ABSTRACT
Religious moderation in Islamic education is often treated as a subject of instruction or a policy slogan rather than as a paradigm for governing institutions. This article examines wasathiyah as a paradigm for the management of Islamic higher education in Indonesia through three questions: how the concept has been formed and institutionalized historically, how its values can be operationalized across management functions, and what challenges and contributions it presents for global peace. Using a critical literature review and policy document analysis, the article traces three layers of genealogy, namely the pesantren tradition, the modernization of madrasah and Islamic higher education, and the policy institutionalization of religious moderation. It then develops an operational matrix that links five values (tawasuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, and tahadhur) to planning, implementation, and evaluation, as well as to the four national indicators of religious moderation. The discussion shows that wasathiyah is most sustainable when it is embedded in institutional design, academic culture, and assessment rather than limited to curricular content. The challenges identified include conceptual plurality, the gap between policy and practice, the measurement of attitudinal outcomes, and the dynamics of the digital public sphere. The article concludes that the Indonesian experience can be shared as a body of reflective practice, offered for dialogue and mutual learning in regional academic collaboration for global peace.

Keywords: *Wasathiyah, Religious Moderation, Islamic Higher Education Management, Genealogy, Global Peace***.**

ABSTRAK
Moderasi beragama dalam pendidikan Islam kerap diperlakukan sebagai materi ajar atau slogan kebijakan, belum sepenuhnya sebagai paradigma tata kelola lembaga. Artikel ini mengkaji wasathiyah sebagai paradigma manajemen pendidikan tinggi Islam di Indonesia melalui tiga pertanyaan: bagaimana konsep tersebut terbentuk dan dilembagakan secara historis, bagaimana nilai-nilainya dapat dioperasionalkan dalam fungsi-fungsi manajemen, serta apa tantangan dan kontribusinya bagi perdamaian global. Dengan kajian pustaka kritis dan analisis dokumen kebijakan, artikel ini menelusuri tiga lapisan genealogi, yaitu tradisi pesantren, modernisasi madrasah dan perguruan tinggi Islam, serta

institusionalisasi moderasi beragama dalam kebijakan. Selanjutnya disusun matriks operasional yang menghubungkan lima nilai (tawasuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, dan tahadhur) dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta dengan empat indikator nasional moderasi beragama. Pembahasan menunjukkan bahwa wasathiyah paling berkelanjutan apabila ditanamkan dalam desain kelembagaan, budaya akademik, dan sistem asesmen, tidak berhenti pada muatan kurikulum. Tantangan yang teridentifikasi meliputi keragaman pemaknaan konsep, jarak antara kebijakan dan praktik, pengukuran capaian sikap, serta dinamika ruang digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengalaman Indonesia dapat dibagikan sebagai praktik reflektif yang ditawarkan untuk dialog dan pembelajaran bersama dalam kolaborasi akademik regional bagi perdamaian global.

Kata Kunci: *Wasathiyah, Moderasi Beragama, Manajemen Pendidikan Tinggi Islam, Genealogi, Perdamaian Global.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi Islam memikul tanggung jawab ganda: mengembangkan keilmuan yang mendalam dan membentuk keadaban yang menuntun penggunaan ilmu itu (Azra, 2019). Pada dunia yang semakin terhubung, tanggung jawab tersebut tidak lagi berhenti pada batas kampus atau negara. Perjumpaan lintas budaya, percepatan informasi, dan keragaman cara memahami agama menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu ruang strategis tempat gagasan tentang perdamaian dirumuskan, diuji, dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Baidhawy, 2005).

Dalam khazanah Islam, gagasan tentang keseimbangan dan keadilan dirangkum dalam konsep *wasathiyah*, yang berakar pada penyebutan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) dalam QS. Al-Baqarah: 143. Di Indonesia, gagasan ini dikenal luas dalam bahasa kebijakan sebagai moderasi beragama, yaitu cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menjunjung keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan (Manullang, 2025). Konsep ini telah memperoleh tempat dalam wacana publik, dokumen kebijakan, dan program-program perguruan tinggi keagamaan Islam.

Meskipun demikian, pembahasan tentang moderasi dalam pendidikan Islam cenderung bertumpu pada dua ranah, yakni materi ajar dan pembentukan karakter peserta didik (Ramadani et al., 2025, December). Kedua ranah tersebut penting, tetapi keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh ranah ketiga yang lebih mendasar, yaitu tata kelola lembaga. Visi dan misi, struktur organisasi, kebijakan akademik, sistem penjaminan mutu, mekanisme asesmen, serta budaya kerja sivitas akademika menentukan apakah suatu nilai hidup sebagai praktik sehari-hari atau berhenti sebagai rumusan normatif. Karena itu, memandang wasathiyah sebagai paradigma manajemen membuka ruang pengembangan konseptual yang masih dapat diperluas, terutama pada level pendidikan tinggi (Ikhsan, M. A., 2019).

Perspektif historis memperkaya upaya tersebut. Wasathiyah dalam pendidikan Islam di Indonesia tidak lahir dari satu rumusan tunggal (Amar, 2018). Ia tumbuh melalui lapisan-lapisan pengalaman: tradisi keilmuan pesantren, pembaruan kelembagaan madrasah dan perguruan tinggi Islam, serta perumusan kebijakan nasional. Memahami lapisan-lapisan ini membantu menjelaskan

mengapa operasionalisasi di tingkat kampus perlu peka terhadap akar tradisi sekaligus terbuka pada kebutuhan zaman.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana genealogi konsep wasathiyah dalam pendidikan Islam di Indonesia? Kedua, bagaimana nilai-nilai wasathiyah dapat dioperasionalkan dalam fungsi manajemen pendidikan tinggi Islam? Ketiga, apa tantangan yang dihadapi dan kontribusi apa yang dapat dibagikan bagi perdamaian global? Artikel ini disusun dengan semangat dialog. Pengalaman Indonesia diposisikan sebagai bahan refleksi bersama yang terbuka terhadap pengayaan dari konteks lain, bukan sebagai model tunggal yang dianjurkan untuk diikuti.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka kritis yang dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan (Qomaruddin & Sa'diyah 2024). Pilihan ini sejalan dengan tujuan artikel, yaitu membangun kerangka konseptual dan operasional melalui penelaahan terhadap gagasan, sejarah, dan regulasi, bukan mengukur variabel pada sampel tertentu. Sumber data terdiri atas tiga kelompok: literatur akademik tentang wasathiyah, sejarah pendidikan Islam, dan manajemen pendidikan tinggi; dokumen kebijakan dan panduan moderasi beragama pada tingkat nasional; serta dokumen kelembagaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang relevan.

Analisis dilakukan dalam lima tahap (Nurrisa & Hermina 2025). Tahap pertama adalah penetapan fokus dan kriteria pemilihan sumber, yang mencakup relevansi dengan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, otoritas dan kredibilitas sumber, serta kemutakhiran. Tahap kedua adalah pembacaan mendalam dan pengodean tematik terhadap konsep, nilai, kebijakan, dan praktik kelembagaan. Tahap ketiga adalah sintesis genealogis, yaitu menyusun lapisan-lapisan perkembangan secara tematik, bukan sebagai periodisasi kronologis yang kaku. Tahap keempat adalah penyusunan matriks operasional dengan menempatkan nilai-nilai wasathiyah pada kerangka fungsi manajemen. Tahap kelima adalah refleksi kritis atas peluang dan tantangan.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber (Rahayu & Rindrayani 2025), yakni membandingkan temuan dari literatur akademik, dokumen kebijakan, dan dokumen kelembagaan, serta melalui pemeriksaan konsistensi antarkonsep. Artikel ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan data lapangan primer. Oleh sebab itu, matriks operasional yang dihasilkan diposisikan sebagai kerangka heuristik yang membuka jalan bagi pengujian empiris pada kajian selanjutnya.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Wasathiyah: Dari Konsep Normatif Menuju Paradigma Manajerial

Kata *wasath* dalam tradisi bahasa Arab mengandung makna posisi tengah, adil, dan unggul. Ketiga makna ini saling berkaitan: sesuatu dikatakan berada di tengah karena ia terjaga dari kecenderungan berlebihan maupun berkekurangan, dan karena itu ia dipandang adil dan terpilih. Wasathiyah dengan demikian tidak sama dengan kompromi tanpa prinsip atau netralitas yang kosong. Ia menuntut keteguhan pada nilai pokok sekaligus kelapangan dalam menyikapi perbedaan yang berada pada ruang ijtihad. Dalam kerangka ini, sikap berlebihan (*ifrath*) dan sikap mengurangi (*tafrith*) dipahami sebagai kutub-kutub kecenderungan yang

dapat dialami siapa saja, bukan sebagai label bagi kelompok tertentu. Moderasi beragama, sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan nasional, juga menekankan bahwa yang dimoderasi adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri (Wasathiyah, 2015).

Agar dapat berfungsi sebagai paradigma manajemen, suatu konsep perlu memenuhi tiga ciri. Pertama, ia menjadi orientasi nilai yang mengarahkan perumusan visi, misi, dan tujuan lembaga. Kedua, ia dapat diterjemahkan ke dalam struktur, proses, dan kebijakan yang konkret. Ketiga, ia dapat dievaluasi sehingga lembaga mampu belajar dari pengalamannya. Wasathiyah memenuhi ketiga ciri tersebut apabila nilai-nilainya dirumuskan secara operasional dan dikaitkan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi (Gamar & Maliki, 2025).

Hubungan wasathiyah dengan *maqasid al-shari'ah* memperkuat landasan ini (Kulsum, U., 2020). Maqasid memberikan arah tujuan, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dalam konteks pendidikan tinggi dapat dibaca sebagai penjagaan terhadap integritas keilmuan, keselamatan dan martabat manusia, kemampuan berpikir, keberlanjutan generasi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Wasathiyah memberikan cara menimbang, yakni bagaimana tujuan-tujuan itu dicapai secara proporsional dan adil. Keduanya saling melengkapi: tanpa maqasid, moderasi kehilangan arah, sedangkan tanpa wasathiyah, pencapaian tujuan dapat kehilangan keseimbangan.

3.2. Genealogi Wasathiyah Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia

Penelusuran terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memperlihatkan tiga lapisan yang membentuk wajah wasathiyah hari ini. Ketiganya tidak berurutan secara saling menggantikan, melainkan hidup berdampingan dan saling memengaruhi (Amar, 2018). Tabel 1 merangkum ciri utama, kontribusi, dan catatan kritis dari masing-masing lapisan.

Tabel 1. Lapisan Genealogi Wasathiyah dalam Pendidikan Islam di Indonesia

Lapisan	Ciri utama	Kontribusi bagi tata kelola	Catatan kritis
Tradisi pesantren dan jaringan keilmuan Nusantara	Pembelajaran bersanad, penghormatan terhadap guru dan ilmu, apresiasi terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dan keragaman mazhab, akomodasi terhadap budaya lokal, kehidupan komunal.	Habitus dan keteladanan sebagai fondasi budaya lembaga.	Lebih banyak hidup sebagai praktik daripada rumusan tertulis, sehingga perlu diartikulasikan agar dapat dievaluasi.

Lapisan	Ciri utama	Kontribusi bagi tata kelola	Catatan kritis
Modernisasi madrasah dan perguruan tinggi Islam	Integrasi ilmu agama dan ilmu lain, standardisasi kurikulum, metodologi ilmiah, ruang akademik yang terbuka bagi kajian kritis.	Kerangka kelembagaan, profesionalisme, dan kebebasan akademik.	Perlu menjaga kedalaman tradisi keilmuan sambil memperluas keterbukaan.
Institusionalisasi moderasi beragama dalam kebijakan	Perumusan sebagai agenda nasional, penetapan indikator, penguatan unit kelembagaan di perguruan tinggi, integrasi dalam dokumen akademik.	Arah yang jelas, bahasa bersama, dan dukungan sumber daya.	Perlu dijaga dari kecenderungan formalistis dan keragaman tafsir operasional.

Lapisan pertama memperlihatkan bahwa sikap tengah dalam pendidikan Islam Nusantara berakar pada praktik yang panjang sebelum dirumuskan sebagai istilah kebijakan. Cara pesantren mengelola perbedaan pendapat, menghormati otoritas keilmuan melalui sanad, dan menerima ekspresi budaya setempat menunjukkan bahwa moderasi dihayati sebagai adab dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Bagi perguruan tinggi yang tumbuh dari tradisi pesantren dan organisasi kemasyarakatan Islam yang beragam, lapisan ini merupakan modal kultural yang berharga.

Lapisan kedua menambahkan dimensi kelembagaan. Pendirian dan pengembangan madrasah serta perguruan tinggi Islam memperkenalkan struktur kurikulum, standar mutu, dan tradisi riset yang membuka pertemuan antara khazanah klasik dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Pertemuan tersebut membentuk ruang akademik tempat perbedaan perspektif dapat dikaji secara terbuka dan bertanggung jawab. Adapun lapisan ketiga menghadirkan kejelasan arah melalui perumusan konsep, indikator, dan penguatan unit kelembagaan, yang memudahkan perguruan tinggi memiliki bahasa dan acuan bersama.

Dari ketiga lapisan tersebut dapat dirumuskan satu pembacaan analitis. Habitus pesantren memberikan jiwa, kelembagaan akademik memberikan struktur, dan kebijakan memberikan arah. Operasionalisasi yang efektif adalah operasionalisasi yang menyambungkan ketiganya. Apabila bertumpu pada kebijakan tanpa akar tradisi, upaya penguatan moderasi berisiko dirasakan sebagai agenda administratif. Apabila bertumpu pada habitus tanpa kerangka evaluasi, praktik baik sulit direplikasi, diukur, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

3.3. Operasionalisasi Wasathiyah Dalam Manajemen Pendidikan Tinggi Islam

Operasionalisasi wasathiyah dalam manajemen pendidikan tinggi Islam dapat disusun dengan mempertemukan tiga unsur: lima nilai (*tawasuth*, *tawazun*,

i'tidal, *tasamuh*, dan *tahadhur*), tiga kelompok fungsi manajemen (perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian), dan empat indikator moderasi beragama yang telah dirumuskan secara nasional, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta akomodasi terhadap budaya lokal. Tabel 2 menyajikan matriks operasional yang dihasilkan.

Tabel 2. Matriks Operasional Nilai Wasathiyah dalam Fungsi Manajemen Pendidikan Tinggi Islam

Nilai	Perencanaan dan pengorganisasian	Pelaksanaan (kurikulum, pembelajaran, budaya kampus)	Evaluasi dan pengendalian	Indikator nasional terkait
Tawasuth **(jalan tengah)**	Visi, misi, dan profil lulusan yang merumuskan keunggulan keilmuan sekaligus keterbukaan secara berimbang; kebijakan akademik disusun melalui musyawarah.	Kurikulum yang memadukan khazanah klasik dan kajian kontemporer; pembelajaran yang menghadirkan beragam pandangan secara proporsional.	Telaah kurikulum berkala untuk memeriksa keseimbangan bahan ajar; refleksi dosen atas pendekatan pembelajaran.	Komitmen kebangsaan; anti-kekerasan
Tawazun **(keseimbangan)**	Capaian pembelajaran yang menyeimbangkan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial; alokasi sumber daya yang proporsional antarprogram.	Integrasi ilmu agama dengan ilmu lain; keseimbangan antara kajian teoretis dan pengabdian kepada masyarakat.	Asesmen yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan sosial.	Komitmen kebangsaan; akomodasi budaya lokal
I'tidal **(keadilan)**	Kebijakan akses, beasiswa, dan layanan yang adil bagi seluruh sivitas akademika; pembagian peran dan kewenangan yang transparan.	Layanan akademik yang setara; perlakuan adil dalam bimbingan, penilaian, dan pemberian kesempatan.	Audit mutu atas keadilan layanan; mekanisme umpan balik dan pengaduan yang mudah diakses.	Toleransi

Nilai	Perencanaan dan pengorganisasian	Pelaksanaan (kurikulum, pembelajaran, budaya kampus)	Evaluasi dan pengendalian	Indikator nasional terkait
Tasamuh **(toleransi)**	Kebijakan yang menjamin ruang diskusi lintas pandangan; kemitraan dengan lembaga lain dalam dan luar negeri.	Pembelajaran dialogis, studi kasus, kuliah tamu lintas tradisi, serta kegiatan kolaboratif lintas budaya.	Pengamatan sikap dalam kegiatan kolaboratif; survei iklim akademik yang bersifat formatif.	Toleransi; anti-kekerasan
Tahadhur **(keberadaban)**	Kode etik akademik dan etika bermedia yang bersumber dari akhlak; penguatan keteladanan pimpinan.	Pembiasaan adab keilmuan, literasi digital yang berakhlak, dan program pengabdian kepada masyarakat.	Portofolio karakter; penilaian kinerja yang memuat integritas dan etika profesi.	Anti-kekerasan; akomodasi budaya lokal

Logika matriks ini bergerak dari nilai menuju keputusan, dan dari keputusan menuju bukti. Suatu nilai tidak cukup dinyatakan dalam dokumen; ia perlu muncul dalam keputusan perencanaan, tampak dalam proses pelaksanaan, dan dapat ditelusuri melalui bukti evaluasi (Ukun & Arifin, 2025). Setiap sel pada matriks dapat diturunkan menjadi indikator kinerja yang sesuai dengan visi dan karakter masing-masing lembaga. Karena itu, matriks ini lebih tepat dipahami sebagai kerangka berpikir yang dapat disesuaikan daripada daftar periksa yang seragam.

Pada fungsi pengorganisasian, keberadaan unit khusus yang menangani moderasi beragama, seperti pusat atau rumah moderasi, dapat memberi energi dan koordinasi. Namun nilai-nilai wasathiyah akan lebih mengakar apabila diarusutamakan dalam seluruh unit, mulai dari program studi, penjaminan mutu, kemahasiswaan, hingga kerja sama. Pimpinan dan dosen memiliki peran kunci, sebab mereka bukan hanya pelaksana kebijakan, melainkan juga teladan yang perilakunya dibaca setiap hari oleh mahasiswa. Penguatan kapasitas dosen dalam merancang pembelajaran dialogis dan memfasilitasi diskusi yang beragam dengan aman menjadi investasi yang menentukan.

Pada fungsi evaluasi, perlu kehati-hatian metodologis dan etis. Capaian sikap dan perilaku lebih tepat dinilai melalui penilaian autentik, pengamatan dalam kegiatan nyata, dan refleksi, dengan indikator yang dapat diamati serta tujuan yang bersifat formatif. Evaluasi diarahkan untuk membantu pembelajaran dan perbaikan lembaga, bukan untuk melabeli individu atau kelompok. Dengan cara ini, penilaian tetap menjaga martabat peserta didik dan kepercayaan sivitas akademika.

3.4. Tantangan Dan Arah Penguatan

Setiap paradigma menghadapi tantangan ketika diterjemahkan ke dalam praktik. Pembahasan berikut mengidentifikasi lima tantangan utama sekaligus arah penguatannya, dengan pandangan bahwa tantangan-tantangan itu merupakan bagian wajar dari proses pelembagaan nilai.

Tantangan pertama adalah keragaman pemaknaan konsep. Wasathiyah dan moderasi beragama dipahami melalui beragam sudut pandang (Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E., 2022), dan keragaman itu mencerminkan kekayaan tradisi intelektual. Tugas lembaga adalah menjaga kejernihan makna tanpa menutup ruang tafsir, misalnya melalui forum dialog akademik, penyusunan rumusan operasional yang disepakati bersama, dan komunikasi yang konsisten. Kehati-hatian konseptual ini juga penting agar moderasi tidak dipahami sebagai pembatasan kebebasan akademik. Kebebasan berpikir dan kedalaman keilmuan justru merupakan prasyarat bagi sikap tengah yang matang.

Tantangan kedua adalah jarak antara kebijakan dan praktik. Rumusan yang baik di tingkat dokumen belum tentu otomatis hadir dalam keseharian kampus, terlebih apabila pelaksanaannya dirasakan sebagai beban administratif tambahan. Penguatan dapat ditempuh dengan mengintegrasikan indikator wasathiyah ke dalam sistem mutu, kurikulum, dan rencana kerja yang sudah ada, sehingga ia menjadi bagian dari cara kerja lembaga, bukan agenda yang berdiri sendiri.

Tantangan ketiga adalah pengukuran. Sikap, nilai, dan kebiasaan berkembang dalam waktu panjang dan dipengaruhi banyak faktor, sehingga pengukuran tunggal berisiko menyederhanakan kenyataan. Pendekatan yang memadukan beberapa teknik, seperti observasi, portofolio, refleksi, dan survei iklim akademik, memberikan gambaran yang lebih utuh dan adil. Pengukuran yang dilakukan secara etis, menjaga kerahasiaan, dan berorientasi perbaikan akan menumbuhkan rasa aman di lingkungan akademik.

Tantangan keempat berkaitan dengan ruang digital. Kecepatan arus informasi memperluas akses terhadap ilmu, tetapi juga mengubah cara otoritas keilmuan dikenali dan diuji. Dalam situasi ini, tradisi keilmuan Islam yang menekankan sanad, verifikasi, dan adab berpendapat menyediakan sumber daya yang berharga. Perguruan tinggi dapat menjadikannya landasan bagi literasi digital yang berakhlak, yakni kemampuan menyaring informasi, menghargai perbedaan pandangan, dan berkomunikasi dengan santun di ruang publik daring.

Tantangan kelima adalah keberlanjutan. Penguatan nilai memerlukan konsistensi lintas pergantian kepemimpinan dan lintas generasi mahasiswa. Dokumentasi praktik baik, pembinaan kader dosen, serta kemitraan jangka panjang dengan pesantren, sekolah, masyarakat, dan lembaga mitra dapat membantu menjaga kesinambungan. Dengan pembacaan ini, tantangan menjadi pintu bagi pembelajaran kelembagaan yang terus berkembang.

3.5. Kontribusi Bagi Perdamaian Global Dan Kolaborasi Akademik Regional

Perdamaian dalam perspektif ini dipahami secara positif, tidak hanya sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai terwujudnya keadilan, kemartabatan, dan kerja sama yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi Islam berkontribusi melalui tiga jalur. Jalur pertama adalah produksi pengetahuan, yaitu kajian dan penelitian yang menawarkan tafsir kontekstual atas persoalan kemanusiaan kontemporer. Jalur kedua adalah pembentukan lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, kecakapan lintas budaya, dan integritas etis. Jalur

ketiga adalah jejaring akademik, yang mencakup mobilitas mahasiswa dan dosen, pertukaran kurikulum, dan riset bersama.

Nilai *tawazun* juga relevan dengan gagasan peradaban yang berkelanjutan. Keseimbangan dalam relasi manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam menuntun pendidikan tinggi untuk menyiapkan lulusan yang mampu mengelola kehidupan bersama secara bertanggung jawab. Dengan demikian, wasathiyah tidak hanya berbicara tentang sikap dalam perbedaan keagamaan, tetapi juga tentang etika pengelolaan kehidupan dalam arti yang luas.

Dalam kerangka kolaborasi regional, pengalaman Indonesia paling bermanfaat apabila dibagikan sebagai praktik reflektif, yakni disertai capaian dan juga persoalan yang belum selesai. Setiap negara memiliki konteks sejarah, hukum, dan sosial yang khas, sehingga yang layak dipertukarkan adalah prinsip, pertanyaan, dan pelajaran, bukan resep yang harus diterapkan secara seragam. Tiga pertanyaan dapat menjadi bahan dialog bersama: bagaimana nilai-nilai wasathiyah diterjemahkan dalam kurikulum dan budaya akademik di masing-masing lembaga; indikator apa yang dinilai bermakna dan layak oleh masing-masing komunitas akademik; serta praktik baik apa yang dapat dipelajari dan dikembangkan bersama. Dialog yang setara seperti ini sekaligus mencontohkan nilai *tasamuh* dan *tahadhur* dalam praktik kerja sama akademik itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa wasathiyah dapat dipahami dan dikembangkan sebagai paradigma manajemen pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Secara genealogis, wasathiyah terbentuk melalui tiga lapisan yang saling melengkapi, yaitu habitus keilmuan pesantren, kelembagaan akademik madrasah dan perguruan tinggi Islam, serta perumusan kebijakan moderasi beragama. Ketiganya membentuk kombinasi antara jiwa, struktur, dan arah yang menjadi modal bagi operasionalisasi di tingkat lembaga.

Secara operasional, nilai *tawasuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *tahadhur* dapat diterjemahkan ke dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian, dengan acuan empat indikator nasional moderasi beragama. Keberlanjutan nilai-nilai tersebut paling terjamin ketika ia tertanam dalam desain kelembagaan, budaya akademik, dan sistem asesmen yang etis dan formatif. Tantangan berupa keragaman pemaknaan, jarak antara kebijakan dan praktik, pengukuran capaian, dinamika ruang digital, dan keberlanjutan dapat dihadapi melalui dialog akademik, integrasi ke dalam sistem mutu, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagi perdamaian global, pendidikan tinggi Islam dapat berkontribusi melalui pengetahuan, lulusan, dan jejaring akademik. Pengalaman Indonesia ditawarkan sebagai bahan dialog dan pembelajaran bersama dalam kolaborasi regional. Kajian selanjutnya disarankan untuk menguji matriks operasional melalui studi kasus pada perguruan tinggi tertentu, menggunakan desain kualitatif maupun campuran, serta mengembangkan instrumen evaluasi yang valid, etis, dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Amar, A. (2018a). Nilai Islam Wasathiyah-Toleran dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Program Keagamaan. *Jurnal Cendekia Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, *10*(02), 196–212.

Amar, A. (2018b). Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, *2*(1), 18–37.

Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Prenada Media.

Baidhawy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.

Gamar, N., & Maliki, P. L. (2025). *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Penerbit NEM.

Hamady, H., & Nabil. (2026). Paradigma Pedagogi Pembebasan Paulo Freire dan Konsep Malakah Ibnu Khaldun dalam Dekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia. *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, *10*(1), 98–111.

Ikhsan, M. A. (2019). Al-Quran dan Deradikalisasi Paham Keagamaan di Perguruan Tinggi: Pengarusutamaan Islam Wasathiyah. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, *2*(2), 98–112.

Kulsum, U. (2020). Konstelasi Islam Wasathiyah dan Pancasila serta Urgensinya dalam Bernegara Perspektif Maqasid al-Syari'ah. *Journal of Islamic Civilization*, *2*(1), 51–59.

Manullang, H. B. (2025). Analisis Kritis terhadap Moderasi Beragama dalam Upaya Pengembangan Perdamaian dalam Konteks Kemajemukan Agama. *Aradha: Journal of Divinity, Peace and Conflict Studies*, *5*(1), 19–36.

Nabil, N. (2020). Dinamika Guru dalam Menghadapi Media Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 51–62.

Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, *2*(3), 793–800.

Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E. (2022). Wasathiyah (Moderasi Beragama) dalam Perspektif Quraish Shihab. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, *3*(1), 66–80.

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, *1*(2), 77–84.

Rahayu, R., & Rindrayani, S. R. (2025). Menguji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, *3*(2), 327–331.

Ramadani, F. A., Barid, F. A., & Ais, A. D. R. (2025). Pendidikan Islam Moderat: Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI untuk Pembentukan Karakter Toleran Peserta Didik. *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, *10*(1), 1551–1558.

Ukun, U. K., & Arifin, M. A. (2025). Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Konsep Kurikulum Pendidikan Islam sebagai Rasionalisasi Akademik di Sekolah Menengah Atas. *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, *9*(1), 80–90.

Wasathiyah, M. (2015). *Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran: Studi Komparatif antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar At-Tafasir*.